

MASALAH-MASALAH HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**
EKO SABAR PRIHATIN

**PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2004 SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN
Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa
(CLEAN AND GOOD GORVERNANCE)**
SONHAJI

**PEMILIHAN UMUM : ANTARA MEMBANGUN
KEPERCAYAAN RAKYAT DAN KEKUASAAN**
KUSHANDAJANI

**PERBEDAAN YANG MENDASAR
DALAM PEMILU 2004**
INDARJA

**MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT MELALUI PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI**
SRI NUR HARI SUSANTO

**RE-ORIENTASI KONSEP "COASTAL REGION ECO-DEVELOPMENT" SEBAGAI POLA
ILMIAH POKOK UNDIP DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
L. TRI SETYAWANTA R.

**PENEGAKAN HUKUM PAJAK MELALUI
SANDERA PAJAK (GIJZELING)**
BUDI ISPRIYARSO

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**
NABITATUS SA'ADAH

**KEWENANGAN DAN MISI MAHKAMAH KONSTITUSI :
SEBUAH PERSPEKTIF**
YOAN NURSARI SIMANJUNTAK

**PENGARUH MODEL ASUH ORANG TUA TERHADAP GEJALA
KENAKALAN ANAK / REMAJA (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS)**
A.M. ENDAH SRI ASTUTI



Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Eko Sabar Prihatin	95
Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 sebagai Sarana Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (Clean and Good Governance) Sonhaji	102
Pemilihan Umum : Antara Membangun Kepercayaan Rakyat dan Kekuasaan Kushandajani	114
Perbedaan Yang Mendasar Dalam Pemilu 2004 Indarja	118
Mewujudkan Sustainable Development melalui Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Sri Nur Hari Susanto	127
Re-Orientasi Konsep “Coastal Region Eco-Development” sebagai Pola Ilmiah Pokok Undip dalam Era Pembangunan Berkelanjutan L. Tri Setyawanta R.	136
Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak (Gijzeling) Budi Ispriyarso	149
Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Nabitatus Sa’adah	157
Kewenangan dan Misi Mahkamah Konstitusi : Sebuah Perspektif Yoan Nursari Simanjuntak	165
Pengaruh Model Asuh Orang Tua Terhadap Gejala Kenalakan Anak/Remaja (Suatu Kajian Kriminologis) A.M. Endah Sri Astuti	171

PEMILIHAN UMUM : ANTARA MEMBANGUN KEPERCAYAAN RAKYAT DAN KEKUASAAN

Kushandajani *

Abstrak

Pemilihan umum bukan sekedar proses teknis. Salah satu ukuran penting dalam pemilu adalah apakah warga negara percaya bahwa mereka bebas menjalankan hak-hak mereka untuk menyatakan pendapat politik, berserikat, berkumpul dan bergerak.

Pengujian apakah pemilu berjalan bebas dan adil mencakup penyelenggaraannya, pemanfaatan dari sumber daya pemerintah, netralitas dari militer, profesionalitas jaksa dan polisi, netralitas badan peradilan dan kebebasan media.

Kata kunci : pemilu, kepercayaan dan kekuasaan

A. PENDAHULUAN

"Tenggelam atau berenang, hidup atau mati, selamat atau hancur, saya berikan tangan, saya dan hati saya kepada hak suara ini" (Daniel Webster, 1826)

Ilustrasi di atas menggambarkan kepercayaan yang tinggi dari voters untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi dalam realitanya, membangun kepercayaan masyarakat pada proses pemilu di Indonesia tidaklah mudah. Kita lihat dalam pemilu legislatif pada 5 April 2004 yang lalu, terdapat sekitar 23,34 % atau 34,5 juta rakyat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau suaranya tidak sah. (Kompas, 7 Mei 2004) Angka tersebut jelas di atas perolehan suara Partai Golkar yang memenangkan pemilu dengan 22,48%. Apalagi jika dibandingkan dengan parta-partai lain peserta pemilu, angka tersebut jelas tinggi, mengingat berapa partai yang berhasil melewati angka 6 % saja dari hasil pemilihan umum yang lalu ?

Melihat dan mencermati hasil pemilu tersebut, maka ada satu pertanyaan menarik yang dapat dikaji: apakah nilai utama yang

diperjuangkan dalam pemilu adalah meraih kepercayaan masyarakat atau sekedar meraih kekuasaan? Bisakah keduanya berjalan berbarengan, ataukah satu dan yang lain harus saling mengalahkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka dalam pembahasan berikut akan dipaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan partai politik, fungsi-fungsi politik dan pemilihan umum sebagai sarana partai politik mencapai kekuasaan.

B. PEMBAHASAN

Berbicara tentang pemilu berarti bicara tentang partai politik sebagai kontestan pemilu. Secara umum partai politik dipahami sebagai sekelompok warga yang mengorganisir diri secara stabil, dengan tujuan merebut ataupun mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan. Adapun fungsi-fungsi politik yang dilaksanakan oleh partai politik meliputi sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Eksistensi dan kinerja partai politik akan diukur dari seberapa jauh mereka bisa menjalankan fungsi-fungsi

* Dra. Kushandayani, M.Si, adalah Staf Pengajar FISIP UNDIP dan Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP

politik yang ada. Jika fungsi-fungsi tersebut secara dominan dijalankan oleh partai politik, berarti sistem politik sudah berjalan secara wajar, modern. Akan tetapi jika agen-agen lain yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut, seperti birokrasi bahkan militer, berarti sistem politik memang belum mapan dan masih dalam tingkatan transisi.

Peranan partai politik amat penting bagi proses politik. Keberadaan partai politik merupakan faktor penting bagi pemenuhan kepentingan kelompok masyarakat yang majemuk. Partai politiklah yang menyampaikan informasi rakyat kepada pemerintah, mengartikulasikan kepentingan dan merekrut para calon untuk jabatan politik. Sebaliknya dari sudut umpan balik mereka membantu memastikan bahwa pembuatan peraturan legislatif sudah tepat dan diterapkan dengan baik. Bahkan sebagai penyalur aspirasi rakyat, partai politik sekaligus melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Di sini partai politik juga melakukan peran sebagai *broker* (perantara) antara pemerintah dan masyarakat.

Diantara fungsi-fungsi politik tersebut, fungsi rekrutmen merupakan titik kritis bagi menguat atau melemahnya sistem politik, sebagaimana diutarakan oleh Ranney (1987: 157): "*A key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office*". Sebagaimana dalam sistem tubuh, dimana jantung adalah organ dalam tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, maka demikian pula posisi partai politik dalam sistem politik. Jika tumbuhkembangnya partai politik tidak didasarkan pada pembangunan budaya politik yang positif dan hasil rekrutmen "keliru memilih pemimpin", maka bisa diprediksi "darah" yang beredar dalam sistem politik juga rusak.

Di sini terlihat pentingnya posisi partai politik dalam proses demokratisasi bangsa dan

sekaligus membangun sistem politik yang lebih baik di masa mendatang. Cara untuk membangun sistem politik adalah melalui penguasaan terhadap pemerintahan, yang dicapai melalui pemilu. Melalui penguasaan tersebut, kebijakan-kebijakan partai akan diuji: apakah berhasil membangun sistem lebih baik, termasuk meningkatkan kesejahteraan warga? Atau sistem menjadi rusak karena korupsi merajalela? Dalam pemilu akan teruji apakah sebuah partai dapat merebut kepercayaan rakyat, sekaligus menempatkan kekuasaan di tangan partai pemenang. Akan tetapi semua itu dengan catatan, bahwa pemilih merupakan kelompok rasional yang dapat memilih partai bukan didasarkan pada ikatan emosional semata.

Lalu bagaimana membangun kepercayaan rakyat melalui pemilu? Pemilihan umum bukan sekedar proses teknis. Suatu ukuran yang sangat penting dalam proses ini adalah apakah warga negara percaya bahwa mereka bebas menjalankan hak-hak mereka untuk menyatakan pendapat politik, berserikat, berkumpul, dan bergerak sebagai bagian dari suatu proses pemilihan. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan bagian dari suatu proses politik yang memerlukan kepercayaan masyarakat. Undang-undang dan prosedur pemilihan yang baik memang penting, tetapi belum cukup. Masyarakat harus percaya bahwa pemilihan itu akan dilaksanakan secara efektif dan tidak memihak.

Pengujian apakah pemilihan umum berjalan bebas dan adil mencakup bukan saja penyelenggaraannya tetapi juga pada pemanfaatan semestinya dari sumber daya pemerintah dalam proses pemilihan, netralitas dari militer, profesionalitas jaksa dan polisi dalam menjaga ketertiban dan melindungi mereka yang ingin menjalankan hak-hak sipil dan politik mereka, netralitas badan peradilan, dan kebebasan media dalam menyalurkan informasi

yang akurat dan bertindak sebagai anjing penjaga terhadap pemerintah dan proses politik.

Ada dua tujuan yang bisa dicapai dengan adanya pemilu. Pertama, terbentuknya kekuasaan yang absah, dan kedua tercapainya tingkat keterwakilan politik (*political representation*). Keabsahan (*legitimacy*) itu tidak hanya bergantung pada suara mayoritas saja, tetapi lebih pada bagaimana membangun keyakinan masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang ataupun sekelompok penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Dilihat dari sudut penguasa, *legitimacy* mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga politik yang ada adalah paling wajar untuk masyarakat bersangkutan. Bisa jadi kedua tujuan tersebut dapat dicapai sekaligus dalam waktu yang relatif pendek, tetapi bisa jadi setelah pemilu berlangsung berkali-kalipun kedua tujuan tersebut tidak tercapai. Akan tetapi paling tidak ada manfaat jangka panjang yang bisa diambil positifnya, yaitu terbentuknya budaya politik yang lebih matang dari waktu ke waktu. Budaya politik di sini diartikan sebagai orientasi ataupun kepercayaan dan keyakinan pada komponen-komponen sistem politik seperti lembaga politik, keputusan politik, aktor politik terutama pada cara-cara bermain politik, maka pencapaian tujuan pemilu hendaknya juga dilihat dari segi ini.

Besarnya kemungkinan untuk mencapai kedua tujuan tersebut amat tergantung dari kesadaran para pendukung partai politik, masyarakat dan penyelenggaraan pemilu. Tujuan tersebut dihasilkan oleh keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilu, baik kontestan pemilu, maupun para pelaksana dan pengawas. Dengan demikian tujuan pemilu bukanlah semata-mata yang akan dicapai, tetapi juga proses pemilu yang baik menjadi ukuran keberhasilan sebuah pemilu.

Pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang yang ke-9 kalinya bagi bangsa Indonesia, yang mengikuti tradisi pemilu lima tahunan. Dalam pemilu tahun 2004 ini sangat terasa bagaimana masyarakat mengekspresikan aspirasinya pada partai politik. Kedewasaan masyarakat pemilih untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya diwarnai dengan semangat kedewasaan berpolitik yang cukup tinggi. Dukungan ataupun penolakan terhadap partai politik tertentu tidak diekspresikan dengan paksaan fisik, tetapi dengan sikap "diam" dan penuh perhitungan. Istilah "penuh perhitungan" disampaikan untuk menjelaskan gejala masyarakat yang bersedia ikut hadir dalam kampanye terbuka partai politik manapun sepanjang ada "bayaran" yang sepadan dengan energi yang mereka keluarkan. Bahkan kecenderungan kuat lainnya adalah bebasnya para anggota masyarakat yang awalnya terikat dengan organisasi-organisasi massa (yang merupakan basis kekuatan partai politik tertentu seperti organisasi NU dengan PKB, Muhammadiyah dengan PAN) untuk menyalurkan suaranya, tanpa mengindahkan keterikatan ormas tersebut dengan partai tertentu. Gejala ini jelas berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dimana pilihan diberikan bukan dengan pertimbangan rasionalitas tetapi lebih pada ikatan-ikatan emosional antara calon pemilih dan partai politik.

C. PENUTUP

Kekuasaan adalah alat utama di dalam interaksi politik dimana dan kapanpun proses itu berlangsung. Oleh sebab itu konsepsi negara-negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dan oleh sebab itu dirumuskan kekuasaan di tangan rakyat. Pengejawantahan kekuasaan rakyat adalah melalui pemilu.

Setiap pemilu biasanya selalu diiringi

dengan harapan-harapan baru tentang perubahan yang lebih baik dimasa mendatang. Harapan-harapan tersebut sering pupus seiring dengan berjalannya waktu. Anggapan bahwa partai politik didirikan sekedar untuk memperoleh kekuasaan tidak semuanya salah. Karena setelah partai politik pemenang pemilu duduk di kursi kekuasaan, mereka tidak tahu bagaimana mengelola kekuasaan yang diperolehnya itu untuk perbaikan bangsa. Itu adalah sebagian alasan mengapa masyarakat pada pemilu tahun 2004 ini lebih bersikap skeptis, apatis, bahkan sinis terhadap proses pemilu 2004. Akan tetapi jika ditinjau dari pembentukan budaya politik, sikap-sikap tersebut justru menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap proses politik yang ada. Menjadi sangat mungkin, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan masyarakat bisa dipulihkan kembali rasa percayanya pada sistem politik yang ada, jika ada usaha-usaha yang sangat serius dari partai politik untuk menata dirinya.

Fungsi-fungsi politik dioptimalkan, untuk dijalankan, dan secara internal adanya pengawasan yang ketat terhadap perilaku kader partai akan memberikan umpan balik pada "pencitraan" partai secara lebih positif. Partai-partai politik harus memiliki strategi khusus untuk menjaring kader-kader baru melalui tindakan-tindakan yang justru tidak bernuansa politik, seperti kegiatan sosial dan bahkan budaya. Kepedulian partai pada masalah-masalah sosial dan sekaligus memberikan solusinya, akan memberikan efek ganda pada partai. Di satu sisi akan mendongkrak pamor partai, di sisi lain akan membuat para pimpinan partai terus berupaya untuk meningkatkan dirinya agar mampu mengelola isu-isu dan masalah publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.H. Birch, 1978. *Representation*. Hongkong: The Macmillan Press Ltd.
- Anthony Giddens, (terj.). 2000. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anthony Giddens, 1984. *The Constitution of Society*. Berkeley: University of California Press.
- Austin Ranney, 1987. *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Burns, and Peltason and Cronin. 1989. *Government by The People*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dennis H. Wrong, 1979. *Power: Its Forms, Bases and Uses*. New York: Harper Colophon Books.
- Heinz Euleu, 1963. *The Behavioral Persuasion in Politics*. New York: Random House.
- Iman Toto K Rahardjo, (ed). 2001. *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo.
- Juri. Ardiantoro F, 1999. *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Jakarta: KIPP.
- Miriam Budiardjo, 1981. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moch Nurhasim, (ed.). 2001. *Kualitas Keterwakilan Legislatif: Kasus Sumbar, Jateng, Jatim dan Sulsel*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Robert Dahl, (ter. Sahat Simamora). 1985. *Analisa Politik Modern*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rog Hague and Martin Harrop. 2nd ed. 1987. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Hampshire: Macmillan Education Ltd.